

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA),
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
PERIODE 2012-2015**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Oleh :

DEVANTHARA ADHI NUGRAHA

B200100224

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA),
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
PERIODE 2012-2015**

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Oleh :

DEVANTHARA ADHI NUGRAHA

B200100224

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fauzan', with a stylized flourish at the end.

Fauzan, SE, M.Si, Akt.

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA),
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
PERIODE 2012-2015

Yang diajukan oleh:

DEVANTHARA ADHI NUGRAHA

B200100224

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 8 Februari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

1. **Fauzan, SE. M.Si. Akt.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Erma Setiawati, Ak., MM.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Triyono, SE. M.Si.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. Syamsudin, MM.
NIK: 195702171986031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu pada dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2018

Yang Menyatakan,



Devanthara Adhi Nugraha

B200100224

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA),
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
PERIODE 2012-2015**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal pemerintah kota di Jawa Timur periode 2012-2015. 2) Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2012-2015. 3) Menganalisis pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2012-2015. 4) Menganalisis pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2012-2015. Penelitian ini memakai data time series dari tahun 2012-2015. Variabel yang akan diamati adalah Dana alokasi umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah (LW), Belanja Modal (BM) pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2012-2015 di situs web <http://djpk.kemenkeu.go.id>. Teknik analisis data Regresi Linear Berganda (OLS). Hasil penelitian diperoleh: 1) Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 ($352,040 > 1,980$ dan $0,000 < 0,05$). 2) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 ($-2,493 > -1,980$, dan $0,008 < 0,05$). 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 ($2,720 > 1,980$ dan $0,007 < 0,05$). 4) Luas wilayah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 ($0,167 < 1,980$ dan $0,868 > 0,05$).

Kata kunci: Dana alokasi umum, Pendapatan asli daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Belanja Modal, Kabupen/Kota di Jawa Timur

ABSTRACT

This research aims to study aims to 1) analyse the influence of the General Allocation funds against the city government capital expenditure allocation in East Java 2012-2015 period. 2) analyse the influence of the original income areas towards capital expenditure in East Java Regency period 2012-2015. 3) analyze the effect of residual budget financing more towards capital expenditure in East Java Regency period 2012-2015. 4) Analyzing the influence of the area against capital expenditure in East Java Regency period 2012-2015. This research was wearing logging time series from the years 2012-2015. Variables that will be observed is the general allocation Fund (DAU), Original Regional Revenue (PAD), the rest of the More Budget Financing (SiLPA), Area (LW), capital

expenditures (BM) a local government district in East Java the year 2012-2015 on the website [http:// djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id). Linear Regression analysis techniques Multiple logging (OLS). The research results obtained: 1 General allocation Fund) effect significantly to capital expenditures Regency in East Java province year 2012-2015 ($352.040 > 1.980$ and $0.000 < 0.05$). two influential native) income significantly to capital expenditures Regency in East Java province year 2012-2015 ($-2.493 > -1.980$, and $0.008 < 0.05$). 3) remaining More influential Budget significantly to Financing capital expenditures Regency in East Java province year 2012-2015 ($2.720 > 1.980$ and $0.007 < 0.05$). 4) area of effect is not significantly to capital expenditures Regency in East Java province year 2012-2015 ($0.167 < 1.980$ and $0.868 > 0.05$).

Keywords : General, income allocation Fund original areas, Remaining More Financing budget, Area, capital expenditures, Regency East Java

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Siswantoro dan Kusnandar, 2013)

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010 dalam Siswantoro dan Kusnandar, 2013). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Dengan adanya reformasi struktur pemerintahan tersebut, dari struktur yang tersentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi memberikan kesempatan bagi setiap daerah terutama kabupaten dan kota untuk mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, selain itu juga melatih transparansi seluruh pengelolaan potensi sumber daya tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat.

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Menurut Saragih (2003) dalam Yustikasari dan Darwanto (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan

pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Yustikasari dan Darwanto (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Namun, terdapat permasalahan yang muncul dari implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut. Yakni, adanya ketimpangan dan kesenjangan sumber daya dan potensi yang dimiliki antara daerah satu dengan daerah yang lain. Yang nantinya akan memberikan dampak kecemburuan sosial.

Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Siswantoro dan Kusnandar, 2013).

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Simanjuntak dalam Prakosa, 2004). Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. Namun, kenyataannya, transfer dari Pempus merupakan

sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD (Prakosa, 2004).

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah (Siswantoro dan Kusnandar, 2013).

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun

kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007)

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Studi yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2004) dalam Siswanto dan Kusnandar (2013) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal, sementara PAD tidak.

SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal (Siswanto dan Kusnandar, 2013).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kusnandar dan Dodik Kiswanto (2012) “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan obyek studi penelitian pada kabupaten dan kota di daerah Jawa Timur periode 2012-2015 untuk membedakan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal suatu daerah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum

(DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kota di Jawa Timur Periode 2012-2015”.

2. METODE

Data dalam penelitian ini menggunakan data data *cross section* berupa laporan keuangan kabupaten/kota yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD. Data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menggunakan data Realisasi Anggaran tahun 2012, 2013, 2014, 2015 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (LHP-BPK 2012, 2013, 2014, 2015). Data Luas Wilayah bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di <http://kemendagri.go.id>. Untuk data alokasi belanja modal menggunakan data APBD tahun 2012-2015 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan yang berupa data online yang ada di situs web <http://djpk.kemenkeu.go.id>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program *IBM SPSS versi 21* dan diperoleh persamaan regresi: $BM = 388054,046 + 0,833DAU + 0,000PAD + 0,000SiLPA + 3,178LW + e$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : Hasil analisis regresi linear berganda di atas menunjukkan nilai konstanta 388054,046, artinya apabila variabel DAU, PAD, SiLPA, dan LW dianggap konstan maka variabel belanja modal bernilai sebesar 388054,046 rupiah, Koefisien DAU menunjukkan nilai sebesar positif 0,833 yang artinya jika variabel DAU meningkat maka variabel Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya apabila DAU turun maka Belanja Modal mengalami penurunan, Koefisien PAD menunjukkan nilai sebesar positif 0,000 yang artinya jika variabel PAD meningkat maka variabel Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya apabila PAD turun maka Belanja Modal mengalami penurunan, Koefisien SiLPA menunjukkan nilai sebesar positif 0,000 yang artinya jika

variabel SiLPA meningkat maka variabel Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya apabila SiLPA turun maka Belanja Modal mengalami penurunan, Koefisien LW menunjukkan nilai sebesar positif 3,178 yang artinya jika variabel LW meningkat maka variabel Belanja Modal juga akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya apabila LW turun maka Belanja Modal mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini dibahas pengaruh antar variabel dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM) Hipotesis pertama (H_1) menyatakan terdapat pengaruh antara variabel dana alokasi umum dengan belanja modal. Hipotesis ini diterima karena besarnya nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($352,040 > 1,980$), nilai signifikansi $<$ nilai $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004), Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), dan Solikin (2007) Putro (2011), serta Kusnandar dan Siswanto (2012) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kusnandar dan Siswanto (2012) menjelaskan bahwa variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011). Namun Moisio (2002 dalam Abdullah dan Halim, 2006) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer).

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan

kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah (Siswanto dan Kusnandar, 2013).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Hipotesis kedua (H_2) menyatakan terdapat pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Hipotesis ini diterima karena besarnya nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-2,493 > -1,980$), nilai signifikansi $< \alpha = 5\%$ ($0,008 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prakoso (2004), Darwanto dan Yustikasari (2007), Kusnandar dan Siswanto (2012), Mawarnis dan Abdullah (2013), Oktora dan Pontoh (2013), dan Palealu (2013)

Kusnandar dan Siswanto (2012) menjelaskan bahwa daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, seperti pada penelitian ini yang dilakukan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas prekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Kusnandar dan Siswanto (2013).

Lebih lanjut Palealu (2013) juga menjelaskan dalam penelitiannya, memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang akan membiayai

pengeluaran pemerintah daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang nantinya akan menambah pendapatan asli daerah. Dengan begitu peningkatan investasi modal diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan terdapat pengaruh antara variabel SiLPA dengan Belanja Modal. Hipotesis ini diterima karena nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ ($2,720 > 1,980$), nilai signifikansi $> \text{nilai } \alpha = 5\%$ ($0,007 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ardhini (2011), Kusnandar dan Siswanto (2012), serta sejalan dengan penelitian Riyanto (2012).

Riyanto (2012) menyatakan bahwa realisasi di Jawa Tengah tahun 2008-2010 belum sepenuhnya optimal walaupun ada kenaikan baik nominal maupun pertumbuhannya, salah satunya adalah adanya penurunan alokasi belanja modal dalam belanja langsung sebaliknya ada kenaikan belanja barang dan jasa. Sehingga belanja langsung dalam realisasi APBD Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2010 lebih diprioritaskan untuk belanja pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau/pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Seperti halnya penelitian ini yang dilakukan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Alokasi sisa lebih pembiayaan sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun dalam prakteknya ada daerah yang mengalokasikan sebagian atau seluruh sisa SiLPA tersebut untuk belanja habis pakai, yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan untuk lebih mengalokasikan sisa SiLPA kepada belanja sarana dan prasarana. Penelitian tentang pengaruh SiLPA adalah penelitian yang sifatnya masih baru, referensinya pun masih sangat terbatas.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Hipotesis keempat (H_4)

menyatakan terdapat pengaruh antara variabel Luas Wilayah dengan Belanja Modal. Hipotesis ini ditolak karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,980), nilai signifikansi dari variabel luas wilayah lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa luas wilayah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012). Siswanto dan Kusnandar (2013) menyatakan anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 ($352,040 > 1,980$ dan $0,000 < 0,05$), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 ($-2,493 > -1,980$, dan $0,008 < 0,05$), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 ($2,720 > 1,980$ dan $0,007 < 0,05$), Luas wilayah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 ($0,167 < 1,980$ dan $0,868 > 0,05$).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Bagi peneliti mendatang sebaiknya memperpanjang periode penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang berbeda, Bagi peneliti mendatang sebaiknya objek wilayah penelitian dapat diperluas lagi, tidak hanya terbatas pada lingkup wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sehingga tingkat generalisasi yang diperoleh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harianto, David dan Adi Priyo Hadi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 2.
- Palelau, Andreas M. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4, Hal 1189-1197.
- Pontoh, Winston & Fahri Eka Oktora. 2013. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah*. Jurnal Accountability Vol. 2. No. 1.
- Prakosa, Kesit B. 2013. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Volume 8 No. 2.
- Siswanto, Dodik dan Kusnandar. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Yustikasari, Yulia dan Darwanto, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.